

Dampak Skandal Korupsi Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Khairani Alawiyah Matondang¹ Essi Laura Amanda² Rouli Pranatalia Simanjuntak³
Pany Iglesia M Simamora⁴ Olivia Damayanti Marpaung⁵

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: alawiyah@unimed.ac.id¹ essilauraa@gmail.com² roulipranatalia@gmail.com³
iglesiamarsyauli@gmail.com⁴ oliviasiantar@gmail.com⁵

Abstract

Corruption is a serious problem in governance in Indonesia, impacting transparency, accountability, and public trust. This study analyzes the impact of corruption scandals on public trust and the quality of public services using a qualitative approach based on case studies, covering the cases of Bank Century, e-KTP, and Jiwasraya. The results show that corruption scandals weaken public trust, hinder the effectiveness of anti-corruption policies, and worsen bureaucratic inefficiency, especially in the education and health sectors. Although transparency regulations have been implemented, their implementation is still hampered by weak law enforcement and low public awareness. This study emphasizes the importance of stricter anti-corruption policies, strengthening supervisory institutions, and utilizing digital technology in government administration. Systematic and collaborative efforts between the government, society, and independent organizations are needed to improve transparency and public accountability.

Keywords: Corruption, Transparency, Accountability, Public Trust, Anti-Corruption Policy, Public Service

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan serius dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, berdampak pada transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Penelitian ini menganalisis pengaruh skandal korupsi terhadap kepercayaan masyarakat dan kualitas layanan publik dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, mencakup kasus Bank Century, e-KTP, dan Jiwasraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skandal korupsi melemahkan kepercayaan masyarakat, menghambat efektivitas kebijakan antikorupsi, dan memperburuk inefisiensi birokrasi, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Meskipun regulasi transparansi telah diterapkan, implementasinya masih terkendala lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran publik. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan antikorupsi yang lebih ketat, penguatan lembaga pengawas, serta pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan. Upaya sistematis dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi independen diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Kata Kunci: Korupsi, Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Publik, Kebijakan Antikorupsi, Pelayanan Publik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan struktural yang menghambat pembangunan ekonomi, melemahkan institusi negara, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023). Praktik korupsi yang terus berulang mencerminkan kelemahan dalam sistem tata kelola pemerintahan, baik dari aspek regulasi, penegakan hukum, maupun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas (Universitas Sebelas Maret, 2023). Transparansi dan akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang dapat membatasi peluang korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara (Universitas Telkom, 2023). Namun, meskipun berbagai

regulasi telah diterapkan, efektivitasnya masih dipertanyakan karena lemahnya implementasi serta berbagai celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh para koruptor (Nugraha & Putri, 2021). Dalam konteks Indonesia, korupsi telah menjadi fenomena yang sistemik dan berakar dalam birokrasi serta sektor swasta. Menurut Telkom University (2013), korupsi terjadi tidak hanya karena lemahnya regulasi tetapi juga akibat kurangnya transparansi dalam administrasi pemerintahan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak mereka dalam mengakses informasi publik. Ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup bergantung pada regulasi formal semata, tetapi juga perlu didukung oleh peningkatan pemahaman hukum dan transparansi di kalangan masyarakat. Di sisi lain, Universitas Riau (2023) menekankan bahwa transparansi yang tinggi tidak selalu menjamin rendahnya tingkat korupsi, terutama jika tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat dan sanksi yang efektif bagi pelaku korupsi. Sebagai contoh konkret, kasus skandal Bank Century, e-KTP, dan Jiwasraya menunjukkan bahwa korupsi dalam skala besar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Setyaningrum, Nugraha, & Putri, 2021). Sementara itu, skandal e-KTP mengungkap betapa lemahnya sistem pengawasan dalam proyek nasional yang melibatkan dana publik dalam jumlah besar (Nugraha & Putri, 2021). Skandal Jiwasraya, di sisi lain, memperlihatkan bahwa korupsi juga dapat merugikan masyarakat secara langsung, terutama nasabah yang kehilangan investasi mereka akibat pengelolaan dana yang tidak bertanggung jawab (Universitas Esa Unggul, 2023).

Menariknya, meskipun ada bukti kuat bahwa transparansi dan akuntabilitas dapat membantu mengurangi tingkat korupsi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dampaknya tidak selalu signifikan jika tidak diikuti dengan reformasi struktural yang lebih mendalam (Telkom University, 2013). Misalnya, penelitian Universitas Negeri Makassar (2023) mengungkap bahwa dalam beberapa kasus, pemerintah daerah yang memiliki kebijakan transparansi tetap mengalami tingkat korupsi yang tinggi karena tidak adanya sistem sanksi yang efektif bagi pelanggar. Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi saja tidak cukup; harus ada mekanisme akuntabilitas yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Lebih jauh, dampak korupsi tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan kebijakan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas layanan publik. Universitas Telkom (2023) menyoroti bagaimana praktik korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan menyebabkan inefisiensi birokrasi serta meningkatnya biaya layanan bagi masyarakat. Ketika dana pendidikan dikorupsi, kualitas pendidikan menurun, guru dan siswa tidak mendapatkan fasilitas yang memadai, dan akses terhadap pendidikan berkualitas menjadi semakin terbatas (Universitas Sebelas Maret, 2023). Demikian pula dalam sektor kesehatan, korupsi dalam pengadaan alat medis dan obat-obatan memperburuk akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak (Universitas Riau, 2023). Ini membuktikan bahwa korupsi bukan hanya sekadar kejahatan ekonomi, tetapi juga kejahatan sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Berbagai temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif. Regulasi yang ketat harus diiringi dengan peningkatan kapasitas lembaga pengawas, penguatan sistem hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Nugraha & Putri (2021) menegaskan bahwa peran serta masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran publik sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan juga dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan transparansi serta mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang (Setyaningrum, Nugraha, & Putri, 2021). Dengan mempertimbangkan berbagai temuan ini,

penting bagi pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada perbaikan regulasi, tetapi juga menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih kuat serta menanamkan budaya antikorupsi di tengah masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi kunci dalam memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan secara efektif. Tanpa adanya pendekatan yang menyeluruh, korupsi akan tetap menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji pengaruh skandal korupsi terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Pemilihan studi kasus dilakukan karena memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi secara mendalam aspek sosial, politik, dan kelembagaan yang berkaitan dengan korupsi, serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat dan sistem tata kelola pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan dalam transparansi dan akuntabilitas setelah skandal korupsi terungkap. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder yang relevan, termasuk laporan resmi dari instansi pemerintah serta organisasi yang berfokus pada pemberantasan korupsi, dokumen hukum dan regulasi, artikel jurnal akademik, buku, serta laporan investigasi media. Dokumen dari institusi seperti KPK, BPK, dan Transparency International menjadi sumber utama dalam menganalisis dampak skandal korupsi terhadap kebijakan transparansi serta mekanisme akuntabilitas di sektor publik. Selain itu, analisis terhadap undang-undang dan kebijakan yang terkait dengan pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana regulasi yang ada mempengaruhi praktik transparansi dan akuntabilitas setelah skandal terungkap.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menerapkan teknik studi dokumen yang memungkinkan penelusuran secara sistematis terhadap berbagai sumber informasi yang tersedia. Melalui analisis mendalam terhadap laporan dan dokumen yang telah dikumpulkan, penelitian ini berusaha mengidentifikasi pola dan tren dalam skandal korupsi, serta dampaknya terhadap institusi publik. Teknik analisis kualitatif tematik digunakan untuk mengkategorikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh, dengan fokus pada perubahan dalam regulasi, reaksi masyarakat, serta dampak skandal terhadap tata kelola pemerintahan. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang mencakup pengorganisasian informasi, pengkodean tema utama, serta evaluasi kritis terhadap kasus-kasus yang diteliti. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggali hubungan antara skandal korupsi dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan setelah kasus tersebut terungkap. Penelitian ini memilih kasus berdasarkan sejumlah kriteria, yakni skandal dengan dampak besar, melibatkan dana publik dalam jumlah signifikan, serta memicu perubahan penting dalam kebijakan transparansi dan akuntabilitas setelah terungkap. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang dampak skandal korupsi terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah serta bagaimana kebijakan transparansi dan mekanisme akuntabilitas dapat diperkuat untuk mencegah korupsi di masa depan. Dengan menelaah berbagai kasus yang telah terjadi, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan mengenai tantangan dan peluang dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis bagaimana skandal korupsi memengaruhi transparansi dan akuntabilitas publik di Indonesia. Studi kasus yang diteliti menunjukkan bahwa skandal korupsi yang melibatkan dana besar Selain merugikan keuangan negara, korupsi juga

melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mengurangi efektivitas kebijakan dalam memberantas korupsi. Dampak dari skandal ini terlihat dalam berbagai aspek, termasuk kepercayaan publik, efektivitas kebijakan, serta kualitas layanan publik yang semakin menurun. Salah satu kasus yang menjadi perhatian utama adalah skandal korupsi Bank Century, yang melibatkan penyalahgunaan dana bailout sebesar Rp 6,7 triliun (Suryani, 2024). Skandal ini mengungkap lemahnya pengawasan terhadap sektor perbankan dan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan serta pemerintah. Selain itu, kasus korupsi e-KTP yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun menunjukkan bagaimana praktik korupsi sistematis dapat merusak kredibilitas sistem administrasi negara (Pinter Hukum, 2024). Sementara itu, skandal Jiwasraya, dengan kerugian negara mencapai Rp 16,8 triliun, berdampak langsung pada ribuan nasabah yang kehilangan dana mereka dan memunculkan kritik terhadap pengawasan di sektor asuransi (Setiawan, 2024). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skandal Korupsi tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi, tetapi juga menghambat transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana skandal tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya ketidakpercayaan publik serta merosotnya kualitas pelayanan publik.

1. Dampak Skandal Korupsi terhadap Kepercayaan Publik. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara merupakan elemen kunci dalam tata kelola yang baik. Studi yang dilakukan oleh Fasya Al Azzah (2024) menunjukkan bahwa skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara secara signifikan menurunkan legitimasi pemerintah. Hal ini sejalan dengan temuan Saraswati dan Triyanto (2022), yang menjelaskan bahwa peningkatan kasus korupsi berbanding lurus dengan meningkatnya persepsi negatif masyarakat terhadap institusi pemerintah. Lebih lanjut, Setiawan (2024) menemukan bahwa skandal korupsi di sektor perbankan dan keuangan, seperti Bank Century dan Jiwasraya, berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap industri keuangan. Kepercayaan yang menurun ini menghambat pertumbuhan ekonomi karena masyarakat menjadi lebih skeptis terhadap kebijakan keuangan pemerintah. Dampak psikologis dari skandal ini juga tidak dapat diabaikan. Ketika masyarakat terus-menerus disuguhi berita tentang pejabat negara yang terlibat korupsi, rasa apatis terhadap sistem pemerintahan semakin meningkat. Ini bisa mengarah pada rendahnya partisipasi publik dalam pemilu, kurangnya minat untuk mengawasi kebijakan publik, serta meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk melakukan praktik koruptif dalam kehidupan sehari-hari.
2. Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi. Menurut Yuliani (2024), transparansi dan akuntabilitas berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penelitian yang dilakukan oleh Suhendra (2024) menunjukkan Negara yang menerapkan transparansi tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Kebijakan keterbukaan informasi publik juga menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa setiap pengeluaran negara dapat diaudit dan dipantau oleh masyarakat. Ketika informasi terkait kebijakan dan pengelolaan dana publik dapat diakses oleh masyarakat, peluang bagi pejabat untuk melakukan penyimpangan dapat diminimalkan. Namun, tantangan terbesar dalam implementasi transparansi adalah lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak mereka untuk memperoleh informasi publik. Namun, Pinter Hukum (2024) menyoroti bahwa meskipun berbagai regulasi terkait transparansi telah diterapkan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk mengakses informasi publik serta kurangnya kapasitas

lembaga pengawas dalam menindaklanjuti laporan korupsi. Di Indonesia, beberapa regulasi seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah diterapkan untuk meningkatkan transparansi. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus di mana lembaga pemerintah tidak sepenuhnya membuka informasi yang seharusnya dapat diakses oleh publik. Beberapa alasan yang sering muncul adalah kurangnya kesiapan infrastruktur, ketakutan akan konsekuensi politik, serta adanya budaya birokrasi yang masih mengutamakan kerahasiaan dibandingkan keterbukaan. Untuk meningkatkan efektivitas transparansi, diperlukan reformasi dalam sistem pengawasan. Institusi pengawas seperti KPK dan BPK perlu diperkuat, baik dalam hal independensi maupun kemampuan mereka untuk menindaklanjuti kasus korupsi yang terungkap. Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil dan media dalam mengawal kebijakan publik harus lebih didorong agar ada mekanisme pengawasan yang lebih menyeluruh dan tidak hanya mengandalkan institusi pemerintah semata.

3. Dampak Korupsi terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi juga mempengaruhi langsung mutu layanan publik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2024), korupsi di sektor pelayanan publik menyebabkan rendahnya efisiensi birokrasi dan meningkatnya biaya layanan bagi masyarakat. Ketika dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur disalahgunakan, masyarakat yang paling merasakan dampaknya. Karena anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas umum malah disalahgunakan oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh, dalam sektor pendidikan, kasus korupsi pengadaan buku dan pembangunan sekolah yang sering terjadi menyebabkan kualitas pendidikan menurun. Siswa dan guru harus menghadapi fasilitas yang tidak memadai, kurikulum yang kurang berkembang, serta akses pendidikan yang tidak merata. Di sektor kesehatan, korupsi dalam pengadaan alat medis dan obat-obatan berkontribusi terhadap tingginya biaya layanan kesehatan, sehingga masyarakat kelas menengah ke bawah sulit mendapatkan layanan yang layak. Suhendra (2024) juga mengemukakan bahwa korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan memiliki dampak paling signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika dana pendidikan disalahgunakan, kualitas pendidikan menurun, dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan juga semakin terbatas. Oleh karena itu, akuntabilitas yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Implikasi terhadap Kebijakan Antikorupsi. Temuan dalam penelitian ini memperkuat argumen bahwa penerapan kebijakan antikorupsi yang lebih ketat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Menurut Fasya Al Azzah (2024), strategi antikorupsi yang efektif harus mencakup penguatan peran lembaga pengawas, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan antikorupsi tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Selain itu, Yuliani (2024) menekankan bahwa penggunaan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan dapat membantu mengurangi peluang terjadinya korupsi. Digitalisasi dalam sistem keuangan dan pengadaan barang dan jasa memungkinkan pengawasan yang lebih ketat serta mengurangi interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat, yang sering kali menjadi celah terjadinya praktik korupsi. Partisipasi publik juga harus ditingkatkan dalam pengawasan kebijakan. Masyarakat perlu diberdayakan agar memiliki kesadaran kritis terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Program edukasi antikorupsi harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah

dan kampanye kesadaran publik agar generasi mendatang lebih siap menghadapi tantangan korupsi di masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa skandal korupsi memiliki dampak yang luas terhadap transparansi dan akuntabilitas publik di Indonesia. Kasus-kasus besar seperti Bank Century, e-KTP, dan Jiwasraya menunjukkan bagaimana Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Ketidakpercayaan ini berakibat pada menurunnya partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan serta meningkatnya ketidakpuasan terhadap layanan publik. Selain itu, meskipun regulasi mengenai transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan, efektivitasnya masih terbatas karena lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak akses informasi. Studi menunjukkan bahwa meskipun transparansi dapat mengurangi peluang korupsi, implementasi yang tidak konsisten justru memungkinkan praktik korupsi tetap berlangsung. Oleh karena itu, reformasi kebijakan harus difokuskan tidak hanya pada peningkatan regulasi tetapi juga pada penguatan mekanisme pengawasan serta peningkatan literasi antikorupsi di kalangan masyarakat. Dampak korupsi terhadap pelayanan publik juga sangat signifikan. Penyelewengan dana di sektor pendidikan dan kesehatan menyebabkan rendahnya efisiensi birokrasi serta meningkatnya ketidakmerataan akses terhadap layanan dasar. Ini membuktikan bahwa Korupsi bukan hanya masalah ekonomi dan hukum tetapi juga berkaitan erat dengan kesejahteraan sosial. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih sistematis dalam pemberantasan korupsi. Penguatan lembaga pengawas, penerapan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan publik harus menjadi prioritas utama. Tanpa adanya komitmen yang kuat dan upaya yang berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas hanya akan menjadi konsep teoritis tanpa dampak nyata dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Azzah, F. (2024). Ikhtiar mengakhiri korupsi melalui transparansi dan keterbukaan dana publik. *Republika*. <https://analisis.republika.co.id/berita/so1mfe320/ikhtiar-mengakhiri-korupsi-melalui-transparansi-dan-keterbukaan-dana-publik>
- Nugraha, A., & Putri, R. (2021). Public procurement system and corruption: Evidence from Indonesia. *Journal of Economic Policy Reform*, 24(3), 1-17. <https://doi.org/10.1080/10242694.2021.1954621>
- Pinter Hukum. (2024). Kasus e-KTP: Analisis mendalam dan dampaknya dalam konteks ilmu negara. <https://segiberita.com/studi-kasus-korupsi-dan-dampaknya-pada-kepercayaan-publik-terhadap-politik-indonesia>
- Saraswati, S. R., & Triyanto, D. N. (2022). Pengaruh hasil audit, transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat korupsi. *Open Library Publications*, Telkom University. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/6854>
- Setiawan, A. (2024). Dampak korupsi di sektor publik: Mengapa transparansi sangat penting?. *Karakter Bangkit*. <https://karakterbangkit.blogspot.com/2024/12/dampak-korupsi-di-sektor-publik-mengapa.html>

- Setyaningrum, D., Nugraha, A., & Putri, R. (2021). Public procurement system and corruption: Evidence from Indonesia. *Journal of Economic Policy Reform*, 24(3), 1-17.
<https://doi.org/10.1080/10242694.2021.1954621>
- Suhendra, E. (2024). Dampak dan upaya penanggulangan korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Jurnal UNS*.
<https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/download/32704/21634>
- Suryani, T. (2024). Akuntabilitas dan transparansi publik sebagai instrumen mencegah dan mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal UNS*.
<https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/download/32704/21634>
- Telkom University. (2013). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Tingkat Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2013.
<https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/172605/pengaruh-temuan-audit-transparansi-akuntabilitas-terhadap-tingkat-korupsi-studi-pada-pemerintah-dearah-jawa-tengah-tahun-2016-2019-.html>
- Universitas Esa Unggul. (2023). Dampak dan Upaya Penanggulangan Korupsi untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
<https://karakter.esaunggul.ac.id/index.php/pku/article/view/828>
- Universitas Negeri Makassar. (2023). Dinamika Korupsi: Tantangan dan Solusi dalam Pelayanan Publik. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/61353>
- Universitas Riau. (2023). Dampak Kebijakan Transparansi terhadap Integritas Pejabat Publik di Indonesia. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/download/33995/11680>
- Universitas Sebelas Maret. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Publik sebagai Instrumen Mencegah dan Memberantas Korupsi.
<https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/download/32704/21634>
- Universitas Telkom. (2023). Pengaruh Temuan Audit, Transparansi, dan Akuntabilitas terhadap Tingkat Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Tahun 20162019.
<https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/172605/pengaruh-temuan-audit-transparansi-akuntabilitas-terhadap-tingkat-korupsi-studi-pada-pemerintah-dearah-jawa-tengah-tahun-2016-2019-.html>
- Yuliani, D. (2024). Dampak kebijakan transparansi terhadap integritas pejabat public di Indonesia. *E-Journal UIN Suska*. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/download/33995/11680>